

Hasil Audit Keuangan Kemendiknas Dislaimer

Kualitas Menurun, Minim Kontrol

JAKARTA - Audit umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penggunaan dana APBN 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah rampung. Hasilnya, audit Kemendiknas tidak mendapatkan opini (disclaimer) dari BPK. Hasil itu menurun daripada audit 2009 yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Audit BPK terhadap laporan keuangan anggaran Kemendiknas 2010 dimulai sekitar dua bulan lalu. Dana APBN 2010 yang masuk ke kantong Kemendiknas sebesar Rp 225,2 triliun. Sebagian besar anggaran itu habis untuk

mengembangkan kemampuan tenaga pendidik atau guru.

Selesai mengaudit, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan Kemendiknas disclaimer. Kesimpulan audit 2010 itu menurun daripada audit anggaran 2009 yang mendapatkan opini WDP. Tahun lalu opini WDP tersebut berujung pada dugaan aliran duit liar dan berpotensi merugikan negara Rp 2,3 triliun. Untuk tahun ini, Kemendiknas belum mendapatkan informasi dari BPK dugaan adanya aliran uang liar.

Keputusan audit laporan keuangan disclaimer oleh BPK itu berdasar beberapa faktor. Pertama, BPK menilai Kemendiknas belum memberikan laporan keuangan dengan baik. Kedua, Kemendiknas dinilai

tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Ketiga, penyajian pelaporan kurang lengkap dan tidak patuh terhadap undang-undang. Keempat, sistem pengendalian internal (SPI) masih lemah.

Menanggapi hasil audit BPK yang disclaimer itu, Staf Khusus Media Sukemi membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan hasil tersebut. Dia mengatakan, dari hasil audit tersebut, BPK bakal mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Kemendiknas. "Kami siap menindaklanjuti rekomendasi itu," kata Sukemi tadi malam, yang saat dihubungi berada di Bali.

Sukemi menambahkan, hingga tadi malam, pihaknya

belum mendapatkan data secara rinci kelemahan-kelemahan dalam laporan keuangan Kemendiknas. Jadi, dia belum berani menjelaskan pos-pos pengeluaran anggaran apa yang disorot BPK. Dia mengatakan, pembacaan BPK tersebut masih sebatas laporan umum. "Kami menunggu laporan detailnya," kata dia.

Di bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil audit disclaimer merupakan indikator kemerosotan akuntabilitas di Kemendiknas. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febril Hendri menjelaskan, hingga sekarang Kemendiknas belum terbuka dalam penggunaan dana APBN.

Sebagai kementerian yang

bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, Febril berharap Kemendiknas lebih terbuka. Dia juga mengatakan, selama ini kontrol internal yang berjalan di Kemendiknas belum optimal. "Tahun lalu dengan status WDP saja memunculkan indikasi kerugian negara, apalagi yang sekarang," kata dia.

Dia berharap, jika benar-benar muncul dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan, BPK segera melakukan audit investigatif. Dengan cara itu, diharapkan laporan keuangan di instansi bertabel tut wuri handayani itu bisa lebih baik daripada tahun lalu. "Idealnya, setelah WDP, harus naik tingkat menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian, Red)," tandasnya. (*wan/iro*)